

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu Empat perusahaan perbankan syariah (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Btpn Syariah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Alasan pemilihan periode tersebut karena ingin mengetahui bagaimana perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia. Pemilihan sektor perbankan dalam penelitian ini karena perbankan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian sebuah negara dan bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga banyak nasabah yang mempercayakan hartanya untuk disimpan di bank. Di Indonesia, bank memiliki peran sentral dalam perekonomian. Setiap sektor membutuhkan bank untuk berbagai keperluan, termasuk transaksi pembayaran dan memenuhi kebutuhan dana. Dengan demikian, stabilitas dan kinerja bank sangat penting untuk menjaga perekonomian tetap berjalan lancar. (Amalia, 2023)

1. Profil Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT

Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara

dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri. (Soparia, M. A.; Hasanah, N.; Yusuf, 2024)

2. Profil Bank Muamalat Indonesia

Nama Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kegiatan usaha perbankan syariah. Tanggal Pendirian sejak 1 November 1991 namun tanggal efektif operasional mulai 1 Mei 1992. Dasar hukum pendirian berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991M / 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2413 HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No.970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 tambahan No.1919A. Modal Dasar sebesar Rp. 11.000.000.000.000 namun modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 1.103.435.151.000. saat ini jumlah karyawan Bank Muamalat sebanyak 4.444 orang dengan jaringan 278 kantor layanan, 83 kantor cabang, 152 kantor cabang pembantu, 43 kantor kas, 710 ATM Muamalat, 103 Mobile Branch Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima. Alamat Perseroan di Jl. Prof. DR. Satrio Kav.18 Jakarta

12940. Entitas Asosiasi dan Afiliasi PT Al Ijarah Indonesia Finance, Baitulmaal Muamalat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, Muamalat Institute, PT. Syarikat Takaful Indonesia. (Asutay, M., & Izhar, 2007)

3. Profil Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 1990 dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), berdasarkan Akta Pendirian No. 102 di hadapan notaris Mudofir Hadi, S.H., pada saat itu beralamat di Jakarta. Pada tahun 2001, Bank diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama. Akuisisi ini diikuti dengan konversi kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah (BMS). Bank mendapatkan izin sebagai bank devisa, pada 16 Oktober 2008. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini

memperluas jangkauan bisnis bank dari domestik hingga internasional. Pada tanggal 8 April 2009, bank mendapatkan izin sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) oleh Kementerian Agama RI.

Dengan demikian, peran bank dalam menyediakan layanan perbankan syariah bagi umat di Indonesia semakin kuat. Demi mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", PT CT Corpora sebagai pemegang saham utama bertekad menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terdepan di Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam upaya terus memperkuat modal bank, memungkinkannya memberikan layanan terbaik di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Upaya lainnya, yaitu pada tahun 2010, pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan modal disetor yang naik dari Rp150,060 miliar menjadi Rp 318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun. Pada tahun 2013, Bank Mega Syariah memperkuat posisinya sebagai bank syariah terdepan di Indonesia dengan melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah. Kemudian, sejak 2018, Bank ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan, dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu

Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia. (B. M. Syariah, 2018)

4. Profil Bank Btpn Syariah

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk (saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen masyarakat inklusi. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu bernama “PT BTPN Syariah Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”). Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah masyarakat inklusi dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin. Nasabah pendanaan pun diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi memberdayakan berjuta keluarga prasejahtera produktif di Indonesia agar kehidupan mereka menjadi lebih berarti. #Deminiatbaik ini bisa terwujud lebih cepat, Bank pun menyediakan jenis-jenis produk pendanaan dengan bagi hasil yang kompetitif melalui pelayanan berorientasi kenyamanan dan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan melalui kinerja #bankirpemberdaya yang kompeten, reputasi Bank yang baik, kinerja keuangan yang sehat dan transparansi Bank dalam pengelolaan dananya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, Bank menyediakan beragam produk dan layanan pembiayaan serta membuka akses pelayanan keuangan bagi perempuan prasejahtera produktif untuk mendapatkan modal usaha, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan #deminiatbaik agar terwujud lebih cepat. Hal ini sejalan dengan visi Bank untuk menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif dan mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Berpedoman pada visi ini pula Bank mengembangkan produk dan layanan pembiayaannya yang paling sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. (B. Syariah, 2022)

5. Dewan Komisaris

Pembentukan dewan komisaris adalah untuk memonitor kinerja manajer. Surat keputusan direksi PT. Bursa Efej Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa

efek untuk memilih dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta good corporate governance di Indonesia. (Dewi, A., & Santoso, 2018)

6. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. (P. R. Indonesia, 2007)

7. Komite Audit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan. Pada beberapa jenis usaha di Indonesia, seperti perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), keberadaan Komite Pemantau

Risiko dalam struktur organisasi telah diwajibkan berdasarkan beragam peraturan yang ditetapkan pihak regulator terkait. Peraturan tersebut ditetapkan demi mendukung peningkatan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan. (Honi et al., 2020)

8. Dewan Pengawas Syariah

Menurut peraturan Bank Indonesia no 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS. (Rochaeli, 2011)

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari semua variabel dalam penelitian ini. Nilai minimum adalah nilai terendah yang tercatat dalam sampel data sedangkan nilai maksimum mencerminkan nilai tertinggi yang ditemukan dalam sampel data. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari semua data dalam variabel yang dibandingkan dengan jumlah total data yang ada. Sementara itu, standard deviation adalah ukuran yang menjelaskan sebaran atau variasi data dalam distribusi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif untuk penelitian ini:

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	20	3.00	10.00	4.5000	2.18849
DD	20	3.00	10.00	5.1000	2.29186
KK	20	3.00	7.00	4.3000	1.17429
DPS	20	2.00	4.00	2.5500	.75915
Y	20	4.31	30.87	15.2070	8.20881
Valid N (listwise)	20				

Berdasarkan tabel Variabel Dewan Komisaris mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 10,00. Sementara nilai standar deviasi sebesar 2,18849 dan nilai rata-rata sebesar 4,5000. Variabel Dewan Direksi mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 10,00 Sementara nilai standar deviasi sebesar 2,29186 dan nilai rata-rata sebesar 5,1000 Variabel Komite Audit mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 7,00. Sementara nilai standar deviasi sebesar 1,17429 dan nilai rata-rata sebesar 4,3000. Variabel Dewan Pengawas Syariah mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,75915 dan nilai rata-rata sebesar 2,5500.

2. Uji Asumsi Klasik

c. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dengan perhitungan menggunakan bantuan SPSS versi 26 dengan taraf

signifikansi 5%. Dengan pengambilan keputusan apabila jumlah perhitungan $> 0,05$ maka dinyatakan berdistribusi normal. Dan apabila $< 0,05$ maka dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berikut 70able perhitungan uji normalitas:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.13629145
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.084
	Negative	-.133
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas tersebut diketahui bahwa nilai P-value (sig) Sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Karena nilai Sig $0,200 > 0,05$ maka residual tersebut berdistribusi normal sehingga dalam uji prasyarat normalitas telah terpenuhi.

d. Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau sempurna antara variable independent. Keberadaan multikolinieritas dapat ditentukan dengan menganalisis nilai Variance Inflation Factor (VIF). Dimana nilai VIF = 10, dengan

71table71san jika $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas, dan jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan SPSS Versi 26 :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.308E-15	5.737		.000	1.000		
	DK	.000	2.704	.000	.000	1.000	.050	9.914
	DD	.000	2.383	.000	.000	1.000	.059	6.957
	KA	.000	3.708	.000	.000	1.000	.093	5.782
	DPS	.000	6.118	.000	.000	1.000	.082	2.265

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Dari table diatas dapat diketahui bahwa besar VIF dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas pada penelitian ini.

e. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dalam satu penelitian ke penelitian lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dihitung menggunakan SPSS versi 26 dengan menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima sehingga tidak terjadi

heteroskedastisitas dan apabila nilai nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS Versi 26 :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.797	3.333		1.439	.171
	DK	-.640	1.571	-.433	-.407	.690
	DD	.263	1.384	.187	.190	.852
	KA	1.706	2.155	.620	.792	.441
	DPS	-2.631	3.555	-.618	-.740	.471

a. Dependent Variable: ABSRES

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas (uji glejser) pada tabel tersebut diketahui bahwa Variabel Independen yang signifikan secara statistik. Karena (probability $> \alpha=5\%$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

3. Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti dalam uji regresi ini adalah regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan.

Adapun hasil uji regresi berganda bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.454	5.737		4.611	.000
	DK	-1.037	2.704	-.276	-.383	.707
	DD	3.730	2.383	1.042	1.566	.138
	KA	4.629	3.708	.662	1.248	.231
	DPS	-17.848	6.118	-1.651	-2.917	.011

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis linier berganda pada tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Perbankan} = 26,454 - 1,037X_1 + 3,370X_2 + 4,629X_3 - 17,848X_4 + \varepsilon$$

- a. Nilai konstanta (α) sebesar. Hal ini menunjukkan keadaan saat variabel kinerja keuangan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya dan apabila variabel dewan komisaris (x_1), Dewan Direksi (x_2), Komite-Komite (x_3), dan Dewan Pengawas Syariah (x_4) yang bernilai 0, maka kinerja keuangan sebesar 26,454.
- b. Nilai koefisien regresi dewan komisaris sebesar 1,037, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris mempunyai pengaruh yang Negatif terhadap kinerja keuangan yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel dewan komisaris maka akan mempengaruhi kinerja keuangan

sebesar 1,037, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

- c. Nilai koefisien regresi Dewan Direksi sebesar 3,370, menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi mempunyai pengaruh yang Positif terhadap kinerja keuangan yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Dewan Direksi maka akan mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 3,370, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. Nilai koefisien regresi Komite Audit sebesar 4,629, menunjukkan bahwa variabel Komite Audit mempunyai pengaruh yang Positif terhadap kinerja keuangan yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan Komite Audit maka akan mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 4,629, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- e. Nilai koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah sebesar 17,848, menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh yang Negatif terhadap kinerja keuangan yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Dewan Pengawas Syariah maka akan mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 17,848, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variable variabel berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen. Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan secara parsial. Berikut disajikan data Uji T Parsial :

Tabel 4. 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.454	5.737		4.611	.000
	DK	-1.037	2.704	-.276	-.383	.707
	DD	3.730	2.383	1.042	1.566	.138
	KA	4.629	3.708	.662	1.248	.231
	DPS	-17.848	6.118	-1.651	-2.917	.011

a. Dependent Variable: Y

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel. Makna dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi dewan komisaris yaitu sebesar $0,707 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti variabel dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan.

- 2) Berdasarkan uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi dewan direksi yaitu sebesar $0,138 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti variabel dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan.
- 3) Berdasarkan uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi komite audit yaitu sebesar $0,231 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti variabel komite-komite tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan.
- 4) Berdasarkan uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi dewan pengawas syariah yaitu sebesar $0,011 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti variabel dewan pengawas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan.

b. Uji F

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua statistik terhadap Statistik dependen. Berikut disajikan uji F statistic dalam penelitian ini :

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	779.060	4	194.765	5.828	.005 ^b
	Residual	501.248	15	33.417		
	Total	1280.308	19			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), DPS, DD, KA, DK						

Dari tabel diatas diketahui bahwa angka signifikannya 0,005. Angka signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit serta dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variasi variable independent (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah) dalam menerangkan variasi variable dependen (kinerja perbankan). Berikut merupakan hasil koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.608	.504	5.78071
a. Predictors: (Constant), DPS, DD, KA, DK				

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,504. Hal ini berarti variasi dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite serta dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi variabel kinerja keuangan sebesar 50,4 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 1,037 dan nilai signifikansi sebesar 0,707. Dengan nilai signifikan diatas 0,05 berarti bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan sehingga hipotesis pertama yang menyatakan “Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan” ditolak.

Hasil Pengujian menunjukkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Jumlah dewan komisaris merujuk pada jumlah individu yang secara resmi menjabat sebagai anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan atau bank pada periode tertentu. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Jumlah ini penting dalam mengukur efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian Perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinos (2020) dan Amelinda & Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 3,370 dan nilai signifikansi sebesar 0,138. Dengan nilai signifikan diatas 0,05 berarti bahwa Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan sehingga hipotesis kedua yang menyatakan “Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan” ditolak.

Dewan Direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah startegis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan (Apriningsih dan Yushita , 2016). Dengan peningkatan anggota dewan direksi maka akan terjadi pula peningkatan hubungan dengan pihak eksternal sehingga peluang perusahaan untuk menarik maupun menyalurkan dana menjadi lebih besar.

Dewan direksi memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Dewan direksi berperan sebagai pimpinan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Dewan Direksi memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya perusahaan. semakin banyak anggota dewan direksi,

akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan (Intia dan Azizah, 2021).

Dewan Direksi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah perusahaan untuk mencapai laba (Esther dkk, 2022). Oleh sebab itu, Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Sukmajati (2018) dan Hendratni et al (2018) yang menyatakan bahwa besar atau kecilnya ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 4,629 dan nilai signifikansi sebesar 0,231. Dengan nilai signifikan diatas 0,05 berarti bahwa Komite-Komite tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan “Komite-Komite berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan” ditolak.

Hipotesis ketiga bahwa komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit berdampak pada pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap laporan keuangan. Namun justru

mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. Salah satu kemungkinan penyebab penurunan Return On Asset (ROA) adalah adanya latar belakang pendidikan anggota komite audit yang baru ditambahkan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah anggota komite audit dan lebih memfokuskan pada fungsi dan tugas komite audit agar pengawasan tidak terlalu ketat dan kinerja keuangan dapat meningkat (Tjua & Masdjojo, 2022). Walaupun komite audit memiliki peran penting dalam memantau proses pelaporan keuangan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, dan CAR) tidak selalu linier. Dengan kata lain, meskipun penting, komite audit tidak selalu memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan (Yuliani & Sukirno, 2018).

4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai 17,848 dan nilai signifikansi sebesar 0,011. Dengan nilai signifikan dibawah 0,05 berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan “Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan” diterima.

Menurut hasil ini, DPS memang berdampak pada hasil keuangan. Ada korelasi negatif antara jumlah DPS di setiap bank dan ROA, seperti yang ditunjukkan oleh nilai B negatif sebesar -17,848. Itulah sebabnya ROA bank

umum syariah akan turun seiring dengan bertambahnya jumlah DPS. Return on asset yang buruk menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. Oleh karena itu, ada korelasi negatif dan signifikan secara statistik antara kinerja keuangan dan DPS. Kinerja keuangan menurun ketika jumlah DPS meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Melia (2023) yang menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negative dan signifikan terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah.

5. Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai F pada tabel dengan signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh seluruh variabel independen tersebut adalah signifikan. Nilai konstanta 26,454 berarti bahwa jika seluruh variabel dianggap konstan maka nilai Kinerja Keuangan akan sebesar 26,454. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,504. Nilai ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Perbankan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023 dipengaruhi sebesar 50,4% oleh variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah sisanya 49,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan di penelitian ini.

Hipotesis Kelima penelitian ini yang menyebutkan “Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Keuangan” diterima. Manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Sari, 2018). Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten ditambah control dari pihak institusi maka aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, pencapaian laba lebih optimal dan terjadilah peningkatan kinerja keuangan.